

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepala daerah merupakan pemimpin daerah yang bertugas menjalankan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat daerahnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Dasar Konstitusi Indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam upaya kepala daerah mewujudkan kesejahteraan umum tentunya membutuhkan peran kepemimpinan kepala daerahnya sebagai pemegang otoritas eksekutif di tingkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 menyatakan bahwa kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu, (1) Memberikan perlindungan masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, dan keutuhan NKRI; (2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi; (4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan; (5) Meningkatkan pelayanan dasar Pendidikan; (6) Menyediakan fasilitas Kesehatan; (7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; (8) Mengembangkan jaminan sosial; (9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; (10) Melestarikan lingkungan hidup; (11) Mengolah administrasi kependudukan; (12) Melestarikan nilai sosial budaya; (13) Serta segala urusan wajib lainnya yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah memisahkan antara urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada

Pasal 9 Pemerintah Daerah memiliki lingkup urusan yang dikenal dengan urusan konkrue pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial. Sementara urusan pemerintah daerah yang bukan pelayanan dasar meliputi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi informatika, koperasi, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Selain itu adapun urusan pemerintah pilihan yang juga menjadi lingkup urusan pemerintah daerah yakni, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Berkaitan dengan segala urusan pemerintah daerah tersebut, keberhasilan otonomi suatu daerah dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala daerahnya.

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah otonom sejak dihapusnya Karesidenan Surakarta pada tanggal 4 Juli 1950. Kota Surakarta saat ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang memiliki visi dan misi yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sementara Misi Kota Surakarta saat ini antara lain; (1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh; (2)

Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata; (4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang Pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga; (5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif; (6) Memakmurkan dan mensejahterakan bersama warga kota yang adil dan inklusif; (7) Merealisasikan daerah yang kondusif dan rukun antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati (Dinas Komunikasi, 2022). Visi misi tersebut dapat direalisasikan bergantung pada kapasitas kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta ke-18.

Gibran Rakabuming Raka merupakan Walikota Surakarta yang dilantik pada 21 Februari 2021 sekaligus Putra Sulung dari Joko Widodo, Presiden RI saat ini. Gibran memiliki latar belakang sebagai pengusaha muda sebelum terjun ke dunia politik. Gibran disebut sebagai salah satu pemimpin daerah yang tergolong muda hingga mendapat julukan pemimpin *millennial*. Proses pencalonan Gibran sebagai Walikota Surakarta menjadi sorotan karena menjegal Achmad Purnomo yang pada saat itu merupakan Calon Walikota Surakarta yang diusung oleh DPC PDI-P Kota Solo. Di mana Achmad Purnomo telah melakukan kampanye selama kurang lebih enam bulan kemudian secara tiba-tiba Gibran naik menjadi Calon Walikota Surakarta dari DPC PDI-P Kota Solo atas usulan dari DPD Jawa Tengah melalui utusan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI-P. Peristiwa ini diindikasikan adanya intervensi dari Joko Widodo, Presiden RI saat ini. Dengan demikian dilihat dari proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai

Walikota Surakarta ini terdapat kuatnya modal sosial yang dimiliki Gibran sebagai Putra Presiden RI yang saat itu sedang menjabat.

Gibran merupakan sosok pengusaha muda dan belum pernah berkiprah dalam dunia politik jika dibandingkan dengan mantan Walikota Surakarta Bapak Rudyatmo yang memang politikus tulen (Siswanto, 2021). Sunny Ummul Firdaus sebagai analis politik menilai bahwa sosok Gibran sebagai Walikota Surakarta akan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan Bapak F.X Hadi Rudyatmo sebagai mantan Walikota Surakarta. Dinilai sebagai sosok yang berlatarbelakang pengusaha, kemudian dari segi usia termasuk dalam kategori generasi milenial, serta memiliki *label* sebagai Putra Presiden RI yang menjabat saat ini yakni Joko Widodo membentuk citra yang berbeda. Dinasti politik Joko Widodo yang dianggap mendongkrak popularitasnya dalam pencalonan Walikota Surakarta serta mendukung kepemimpinannya saat setelah terpilih menjadi Walikota Surakarta, Gibran dianggap memiliki dobrakan dalam memimpin Kota Surakarta. Dikutip dari Kompas.com, Gibran dalam Pemilihan Walikota Surakarta Tahun 2020 lalu memang dianggap memiliki modal sosial yang besar karena didukung oleh popularitas ayahnya yakni Joko Widodo sebagai Presiden RI. Ditambah lagi Kota Surakarta merupakan kota yang menjadi awal karir Joko Widodo sebagai ayahnya (Hakim, 2021).

Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta periode 2020-2025 telah mulai terlihat kinerjanya. Dilihat dari pembangunan fisik pada kepemimpinan Gibran, saat ini terdapat beberapa program pembangunan prioritas di Kota Surakarta. Pertama adalah *Elevated Rail* Simpang Tujuh Joglo yang merupakan

salah satu rel layang terpanjang di Indonesia. Pembangunan rel layang Simpang Tujuh Joglo ini merupakan solusi dari permasalahan kemacetan di Simpang Tujuh Joglo yang sudah lama terjadi. Proyek ini dianggarkan sebesar 1 Triliun oleh Pemerintah Pusat yang mana ini merupakan program pembangunan Walikota sebelumnya yakni F.X Hadi Rudyatmo yang dilanjutkan oleh Gibran. Kedua adalah Revitalisasi Koridor Ngarsopuro dan Gatot Subroto sebagai sentra UMKM dan pengembangan budaya selayaknya Malioboro, Yogyakarta. Revitalisasi tersebut menggandeng Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR yang dianggarkan sebesar Rp 30 Miliar. Pembangunan tersebut juga salah satu amanat dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya pusat kebudayaan di Jawa (Radar Solo, 2021). Ketiga adalah dibangunnya Masjid Syeikh Zayed Al-Nahyan sebagai hibah dari Pangeran UEA sebesar Rp 300 miliar yang saat ini telah menjadi spot wisata religi Kota Surakarta. Dikutip dari website Pemerintah Kota Surakarta eksistensi masjid tersebut di Kota Surakarta saat ini masih menjadi magnet wisatawan Solo hingga luar Solo yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Solo. Oleh karena itu, eksistensi masjid tersebut diharapkan dapat menggeliatkan ekonomi Kota Surakarta (Primasasti, A, 2022). Keempat adalah revitalisasi Solo Technopark yang berfungsi sebagai pengembangan UMKM dan pelatihan *cyber security*. Kelima adalah revitalisasi Kebun Binatang Taman Satwa Taru Juru. Kondisi Taman Satwa Taru Juru yang sudah lama terbengkalai yang menyebabkan kondisi satwa yang mengkhawatirkan serta yang semula kondisi yang kurang mengenakan bagi pengunjung, saat ini telah berubah total karena telah direvitalisasi. Pemerintah Kota Surakarta menggandeng PT Taman Safari Indonesia

dalam proyek revitalisasi tersebut. Pengelolaan kebun Binatang juga terdapat pembagian tugas antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Management Taman Safari Indonesia (Tribunnews, 2022). Berkaitan dengan hal itu, Gibran memiliki kesadaran untuk membangun jaringan (*networking*) dalam kesuksesan proyek pembangunannya.

Proyek pembangunan prioritas Kota Surakarta ketujuh adalah Shelter Manahan. Pembangunan Shelter Manahan bertujuan untuk menata area public sekitar Stadion Manahan supaya lebih rapi dan nyaman. Sebelumnya pedagang kaki lima (PKL) tidak beraturan dalam berjualan di sekitar Stadion Manahan, sehingga keberadaan shelter Manahan ini merupakan fasilitas yang disediakan Pemerintah Kota Surakarta bagi para PKL untuk berjualan dengan tertib dan tertata (Antara News, 2022). Kedelapan adalah Revitalisasi Lokananta sebagai sentra kreativitas dan niaga bagi para seniman dan pelaku UMKM Kota Surakarta. Proyek ini diharapkan dapat mengembangkan industri kreatif nasional. Lokananta merupakan wadah *creative and commercial hub* yang menyatukan ekosistem music, UMKM lokal, dan masyarakat melalui event atau pertunjukan, wisata seni, dan kuliner (Antara News, 2022). Dalam proyek revitalisasi lokananta ini Pemerintah Kota Surakarta didukung oleh Kementerian BUMN. PPA sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa diutus oleh Menteri BUMN untuk merevitalisasi dan mengembangkan Lokananta (Antara News, 2022). Kesembilan adalah Revitalisasi Taman Balekambang yang dilakukan oleh Menteri PUPR untuk menata Kembali ruang terbuka hijau, pembangunan teater, serta pengerukan danau. Revitalisasi ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 159,4 Miliar dengan biaya APBN TA 2022-

2023 (Serpongupdate, 2022). Kesepuluh adalah Revitalisasi sentra IKM Mebel yang tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga terdapat fasilitas pendampingan IKM. Proyek ini mendapat anggaran dari APBN sebesar Rp 43,7 Miliar yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas produksi mebel di daerah Gilingan, Surakarta. Dikutip dari Radar Solo, Gibran selaku Walikota Surakarta meyakini dengan revitalisasi sentra IKM Mebel ini, produksi mebel Kota Surakarta menjadi naik kelas, karena fasilitas akan lebih menunjang serta lebih layak masuk ke pasar ekspor (Bram, D, 2022).

Niat Gibran selaku Walikota Surakarta untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Kota Surakarta sangat terlihat dari keseriusannya diawal kepemimpinannya melalui penggiatan kebijakan vaksinasi. Gencarnya melakukan pembangunan fisik seperti revitalisasi untuk meningkatkan perekonomian Kota Surakarta. Keberhasilan Gibran dalam menarik investasi dan membanjiri Kota Surakarta dengan proyek pusat tidak lepas dari modal sosialnya sebagai Putra Presiden RI yang sedang menjabat saat ini. Gibran mulai menunjukkan progresnya dalam mencapai visi misinya, selama kurang lebih dua tahun menjabat sebagai Walikota Surakarta. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Surakarta mengalami beberapa perubahan dan kemajuan baik dari pembangunan fisik. Pembangunan fisik dapat dilihat dari adanya 10 Program Pembangunan Prioritas Kota Surakarta yang menariknya rata-rata tidak bersumber dari APBD Kota Surakarta.

Dalam rangka membangun suatu daerah dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, seorang kepala daerah dituntut untuk benar-benar memiliki

kapabilitas dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Berkaitan dengan hal itu Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta dalam upayanya membangun Kota Surakarta diharapkan mampu merealisasikan visi misinya selama periode kepemimpinannya di Kota Surakarta. Kapasitas kepemimpinan merupakan kapabilitas seseorang untuk memimpin, mengelola, dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kapasitas kepemimpinan dipengaruhi oleh modal-modal dalam diri seorang pemimpin. Teori Pierre Bourdieu tentang sumber modal memahami bahwa sumber modal yang dimiliki seorang pemimpin mampu menjaga kekuasaan aktor. Sumber modal ini berperan penting dalam mengukur kapasitas kepemimpinan kepala daerah. Sumber modal menurut Pierre Bourdieu terklasifikasi menjadi empat unsur yaitu, modal sosial, modal budaya, modal simbolik, dan modal ekonomi. Keempat modal tersebut merupakan unsur yang berpengaruh terhadap kualitas dari kepemimpinan seseorang khususnya kepala daerah.

Ditinjau dari teori modalitas di atas, Gibran Rakabuming sebagai Walikota Surakarta memiliki modal sosial dalam kapasitas kepemimpinannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gibran merupakan putra sulung dari Presiden RI Joko Widodo saat ini. Ini merupakan prestise yang melekat pada diri Gibran sebagai modal simbolik sekaligus modal sosial. Popularitas sebagai keluarga Presiden RI tidak dapat dipungkiri memberikan label dalam diri Gibran.

Kapasitas kepemimpinan seseorang pasti dipengaruhi oleh modalitas yang dimiliki. Berdasarkan keempat modal yang dimiliki oleh seseorang pemimpin pasti terdapat modal yang dominan atau paling menonjol dalam mempengaruhi kualitas

kepemimpinannya (Bourdieu, P, 1995). Berkaitan dengan pendapat Bourdieu tersebut Gibran sebagai Walikota Surakarta nampak memiliki modal sosial yang kuat sebagai kepala daerah sehingga mampu mendorong masifnya pembangunan infrastruktur oleh APBN dengan besar nilai proyek Rp 2 Triliun hanya dalam dua tahun kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh modal sosial dalam diri Gibran terhadap perkembangan Kota Surakarta dan bagaimana modal sosial tersebut memiliki pengaruh besar bagi peningkatan citra Gibran sebagai seorang pemimpin daerah. Di mana modal sosial tersebut berasal dari dinasti politik Joko Widodo yang merupakan Presiden RI saat ini sekaligus ayah kandungnya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat kapasitas kepemimpinan Gibran jika ditinjau dari modal sosial yang dimilikinya. Hubungan kekeluargaannya dengan Presiden RI ini memberikan nilai tambah bagi kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta, Di mana hubungan kekeluargaan Jokowi yang merupakan Presiden RI dengan Gibran memberikan manfaat secara prinsip kepada warga Kota Surakarta, karena pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Kota Surakarta. Pada penelitian ini akan mengkaji peran Jokowi sebagai jaringan yang dimiliki Gibran terhadap kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta.

Kebaharuan dari penelitian ini adalah mengkaji kapasitas kepemimpinan kepala daerah menggunakan Teori Modalitas yang umumnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan Teori Modalitas digunakan untuk menilai peran modalitas dalam kemenangan calon kepala daerah dalam Pilkada. Sebagaimana dalam penelitian

terdahulu miliki Marno Wance dan Raoda yang berjudul “Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Utara 2018” yang meneliti tentang pengaruh modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus dalam perolehan suara pada Pilkada Maluku Utara 2018. Sama halnya dengan penelitian Rizky Hadiatullah yang berjudul “Modal Budaya dalam Strategi Pemenangan dr. Hj. Faida, MMR dan KH. A. Muqit Arief Pada Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jember” yang meneliti tentang fenomena kemenangan kandidat Kepala Daerah Kabupaten Jember dengan melihatnya melalui modalitas budaya. Pada penelitian Mohammad Mulyadi yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Daerah Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Bengkulu” yang meneliti tentang kepemimpinan kepala daerah terhadap kualitas pembangunan SDM. Di mana penelitian ini tidak menggunakan Teori Modalitas sebagai tolak ukur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar permasalahan yang dijabarkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana modal sosial berperan dalam kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta?
2. Apakah sumber modal sosial Gibran Rakabuming Raka dari politik dinasti?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran modal sosial dalam kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta.
2. Menganalisis politik dinasti sebagai sumber modal sosial Gibran Rakabuming Raka

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu sosial. Di mana penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan yang mengkaji tentang kapasitas kepemimpinan kepala daerah dan pengaruhnya terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan teori dan konsep kepemimpinan yang mampu menjelaskan korelasi modal sosial seorang kepala daerah terhadap kemajuan pembangunan daerah. Serta dalam kajian ilmu, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas teori dinasti politik dan hubungannya dengan politik distributif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi kepala daerah untuk memanfaatkan modalitas yang dimilikinya untuk membangun daerahnya. Demikian pula bagi para calon kepala daerah dapat meningkatkan kualitas diri atau kapabilitasnya terutama pada modal budaya yang dapat diasah secara mandiri supaya dapat menjadi kepala daerah yang berintegritas dan dapat mengelola daerahnya dengan baik.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Dinasti Politik

Demokrasi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari warisan politik dinasti. Institusi yang mendukung politisi yang ingin mendirikan dinasti politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap meluasnya praktik politik dinasti (Kenawas, Y C, 2023). Berdasarkan analisis dari Mietzner dalam (Kenawas, Y C, 2023) menyebutkan bahwa pada limit tertentu pola dominasi politik dinasti terjadi pada proses sistem pemilihan umum yang *candidate oriented* di mana pola ini serupa dengan politik dinasti di beberapa negara yang sistem pilihannya berdasarkan pada partai (*party centered*). Politik dinasti dapat berkembang dalam sistem pemilu yang berpusat pada kandidat atau dalam sistem politik yang mengutamakan partai politik. Di negara-negara yang partai politiknya sudah sangat terlembaga, politik yang dinamis mungkin akan muncul. Lahirnya politik dinasti adalah indikasi dari persoalan-persoalan structural yang terjadi dalam demokrasi di Indonesia (Buehler, M, 2013).

Berdasarkan (Djati, W R, 2013) terdapat spesifikasi tipologi rezim dinasti politik di Indonesia yaitu familisme yang berdasar pada *populism dynasties*, *octopussy dynasties*, *tribalism dynasties*, dan *feudalism dynasties*. *Populism dynasties* merupakan dinasti politik yang dibangun dengan tujuan untuk melanjutkan program pada kepemimpinan sebelumnya. Bentuk dinasti politik pada tipe ini berbasis pada upaya meromantisasi kepala daerah yang sebelumnya. Kemudian *octopussy dynasties* merupakan dinasti politik yang berlandaskan pada *power network* yang berwujud gurita disebabkan oleh luasnya jaringan yang

dimiliki. Hal ini sebagaimana dinasti politik yang dibangun di Banten dengan merancang para kerabat yang terjun ke lingkup politik. Kemudian *tribalism dynasties* yakni dinasti politik yang dilandaskan pada entitas dan reproduksi budaya Kerajaan. Lalu, *feudalism dynasties* yakni dinasti politik yang bersifat kekuasaan gono-gini alias bentuk dinasti politik yang dalandaskan pada patrimonialisme, figurasi, elitism, dan aji mumpung. Pada *case* Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming Raka menganut tipe *octopussy dynasties* karena melibatkan banyak kerabat yang masuk ke lingkup politik. Di mana ini dilihat dengan kemunculan anak kandung serta menantu Jokowi yang masuk ke dunia politik diikuti oleh Anwar Usman selaku Paman dari Gibran juga menduduki kursi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Eksistensi dinasti politik juga menimbulkan pro dan kontra mengenai dampak yang ditimbulkan. Secara umum banyak ahli yang beranggapan bahwa dinasti politik memberikan dampak negatif bagi institusi atau negara. Namun, terdapat asumsi yang menyebutkan bahwa dinasti politik juga dapat menimbulkan dampak positif yakni para politisi yang melakukan praktik dinasti politik lebih mungkin membela demokrasi dibandingkan aktor politik yang tidak melakukan praktik dinasti politik. Pada teori ini beranggapan bahwa politik dinasti tidak boleh dipandang secara homogen di mana dinasti itu dianggap mendukung demokrasi karena berpotensi dapat mengkonsolidasikan demokrasi (Lacroix, J; Pierre, G M; Kim, O, 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku dinasti politik memiliki “modal demokrasi”. Modal demokrasi ini dimaksudkan bahwa apabila dalam praktiknya tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Hal ini termasuk dalam praktik

kekuasaan mengedepankan kepentingan masyarakat sehingga familisme yang dibangun dalam sistem politik secara prinsip dapat menguntungkan masyarakat.

1.5.2 Modalitas dalam Kepemimpinan

Teori modalitas dicetuskan oleh Pierre Bourdieu dalam tulisannya yang berjudul “*The Forms of Capital*” yang memberikan pemahaman bahwa terdapat empat modal yang mempengaruhi kekuasaan dan modal sebagai fungsi relasi sosial yang dapat menjadi pertimbangan pertukaran. Dalam hal ini, modal menjadi alat yang paling krusial untuk melindungi atau mempertahankan pengaruh aktor atau agen. Keterkaitan antara habitus dan arena akan berdampak signifikan terhadap sumber uang yang dimiliki oleh seorang aktor sosial. Seorang aktor dapat terlihat di masyarakat dengan penggunaan modal yang dimiliki. Menurut Pierre Bourdieu modal merupakan kumpulan sumber untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan untuk mempengaruhi. Kekuasaan dalam masyarakat didapatkan karena terdapat potensi yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi masyarakat. Potensi tersebut dapat berupa yang terlihat maupun tidak terlihat, sebagaimana yang disebutkan oleh Bourdieu dalam bukunya yang berjudul “*The Forms of Capital*” menyatakan bahwa modal dalam diri seseorang terbagi menjadi empat modal. Keempat modal tersebut adalah modal sosial, modal budaya, modal simbolik, dan modal ekonomi. Keempat modal tersebut dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap *self-worth* di mata masyarakat.

Modal sosial merupakan jenis modal berupa *networking* atau jaringan yang dimiliki seseorang. *Networking* merupakan potensi yang dimiliki seseorang untuk dapat mendapatkan kekuasaan melalui relasi yang dimiliki. Tidak hanya untuk

mendapatkan kekuasaan, *networking* dapat menjadi sumber daya bagi seorang pemimpin dalam keberhasilan program pembangunan. Secara khusus, dimensi struktural modal sosial memiliki daya tarik menarik. Dalam hal ini memungkinkan interaksi sosial dan dimensi relasional modal sosial memupuk hubungan saling percaya (*trust*), yang keduanya memungkinkan antara dua atau lebih pihak untuk terlibat dalam pertukaran informasi dan sumber daya berkualitas tinggi (Granovetter, M, 1985) dalam rangka menghasilkan keputusan atau kebijakan yang berkualitas. Secara khusus, modal sosial dalam bentuk jaringan sosial yang bernilai, saling percaya dan menghormati, dan rasa kewajiban dan tanggung jawab adalah karakteristik kepemimpinan (Smylie, Mark A; Hart, Ann W, 1999). Modal sosial memiliki keterkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan seseorang yang melalui jaringan yang dimilikinya berhubungan dengan kemampuan lobi dan negosiasi untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian modal sosial yang dimiliki seorang kepala daerah dapat berpengaruh terhadap pembangunan daerahnya.

Modal budaya merupakan modal yang dimiliki seseorang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Modal budaya dapat berasal baik dari pendidikan formal maupun non-formal atau dapat berasal dari warisan keluarga. Modal budaya dapat berupa pengetahuan, *soft skill* maupun *hard skill*. Dalam hal ini termasuk kemampuan problem solving merupakan bagian dari modal budaya. Modal budaya berpengaruh signifikan terhadap potensi kenaikan hierarki sosial pada seseorang. Selain melalui pendidikan formal dan non-formal serta warisan keluarga, modal budaya dapat didapatkan melalui pengalaman kerja hingga pengalamannya dalam suatu asosiasi atau komunitas tertentu. Modal budaya dapat mempengaruhi cara

berpikir dan bertindak yang mana ini sangat penting untuk dimiliki seorang pemimpin. Hal ini karena modal budaya mampu membentuk pola pikir seseorang dalam berpikir kritis yang mana *critical thinking* merupakan modal penting bagi seorang pemimpin. Ini sejalan dengan konsep *habitus* milik Bourdieu yang berkaitan dengan modalitas budaya seseorang, karena *habitus* dapat dibentuk dari pengalaman pribadi seseorang tentang bagaimana berpikir dan bertindak.

Modal simbolik merupakan modal yang dimiliki seseorang berupa prestise, status sosial, otoritas, dan legitimasi. Bentuk modal ini sumber daya yang dioptimalkan untuk mendapatkan kekuasaan simbolik. Tidak dapat dipungkiri terkadang untuk mendapatkan kekuasaan simbolik dibutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti kedudukan, gelar, bahkan citra keluarga. Modal simbolik merupakan modal untuk mendapatkan validasi. Bourdieu mendefinisikan modal simbolik sebagai bentuk validasi dari kekuasaan yang dimiliki tanpa memaksa untuk mendapatkan legitimasi (Managan, K, 2015). Dalam hal ini modal simbolik memberikan *privilege* bagi seseorang yang memilikinya untuk mendapatkan legitimasi. Bentuk modal ini terbilang melekat dan menjadi *personal branding* bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian modal simbolik memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas dan memengaruhi *society* untuk mempercayai dan memvalidasi mengenai realitas seseorang termasuk pemimpin atau kepala daerah dalam konteks ini.

Terakhir adalah modal ekonomi yakni bentuk modal yang dimiliki seseorang yang bersifat materi dan finansial. Modal ekonomi dianggap dapat dengan mudah ditukar atau dikonversikan ke bentuk modal lainnya. Keberadaan

modal ekonomi dapat menyamakan modal-modal yang lain dalam diri seseorang. Modal ekonomi yang dimiliki seseorang berpotensi untuk mudah mendapatkan modal simbolik. Ini sejalan dengan pernyataan Bourdieu bahwa modal ekonomi dan modal simbolik itu dapat ditukar satu sama lain (Bourdieu, P, 1995). Berdasarkan keempat modal yang diklasifikasikan oleh Pierre Bourdieu akan ada salah satu modal dari keempat modal tersebut yang dominan. Demikian dengan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki seseorang pasti dipengaruhi oleh keempat modal tersebut yang salah satunya menonjol atau berpengaruh besar terhadap kepemimpinannya.

Berkaitan dengan konsep modal milik Pierre Bourdieu dalam bukunya “*The Forms of Capital*” dapat menjadi acuan untuk menilai kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam membangun daerahnya. Teori modalitas ini dapat digunakan untuk menilai modal mana yang paling menonjol atau berpengaruh terhadap kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Mengingat keempat modal yang disebutkan oleh Bourdieu yakni modal sosial, modal simbolik, modal budaya, dan modal ekonomi merupakan bentuk sumber yang berdaya bagi seorang pemimpin. Pada konteks Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memiliki modal sosial yang kuat pada penelitian ini, yang dapat mempengaruhi kepemimpinan dan popularitasnya. Di mana asal modal sosial yang dimiliki Gibran bersifat jaringan keluarganya dengan Joko Widodo sebagai ayah kandungnya, yang mampu mendongkrak popularitasnya sebagai kepala daerah.

1.5.3 Teori Politik Distributif dan Fenomena *Pork Barrel Politics*

Politik tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan proses distribusi sumber daya di dalamnya. Politik distributif adalah cara memandang politik sebagai tempat distribusi dan alokasi sumber daya. Segala sesuatu yang dapat membantu warga negara dalam interaksi kekuasaannya dengan pihak lain (politisi, otoritas publik) dianggap sebagai sumber daya. Tidak dapat dipisahkan antara aktivitas politik untuk memenangkan pemilu dan menggalang suara distribusi sumber daya dalam politik (Stokes, S; et al, 2013). Tujuan dari implementasi politik distributif adalah dengan memanfaatkan program-program pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas pada pemilu. Politik distributif terbagi menjadi dua macam yaitu politik distributif programatik dan politik distributif non-programatik. Politik distributif programatik memiliki dua karakteristik yakni; (1) Kriteria distribusinya harus berorientasi pada publik. Dalam politik distributif, wacana publik seringkali mendahului perumusan dan pelaksanaan peraturan atau kebijakan, namun hal ini tidak selalu terjadi; (2) Kriteria distribusi formal harus merupakan distribusi langsung sumber daya yang relevan kepada masyarakat.

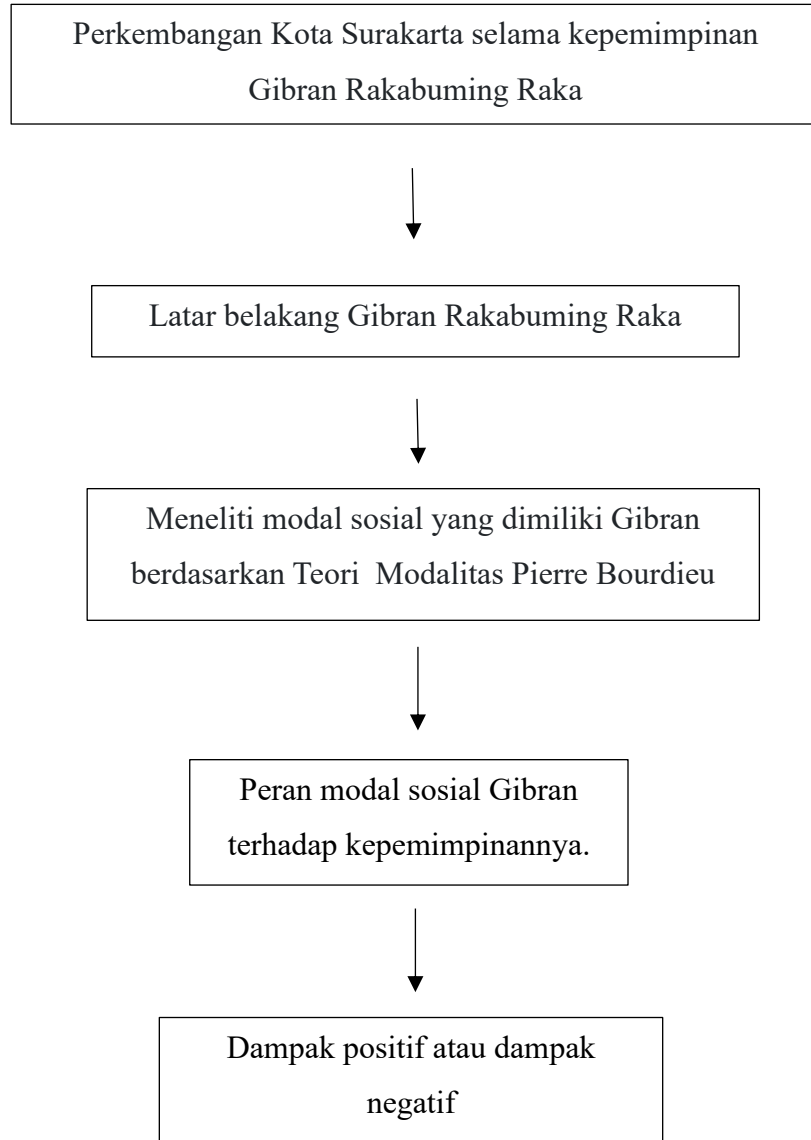
Sementara pada politik distributif non-programatik terbagi menjadi dua yakni klientelisme dan bias partisan. Taktik distribusi yang disebut klientelisme terjadi ketika seorang kandidat atau partai politik menawarkan keuntungan nyata kepada masyarakat sebagai imbalan atas dukungan mereka (Saragintan & Syahrul, 2016). Dengan demikian pada klientelisme, pemilih yang tidak memberikan hak suaranya pada kandidat tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan material dari kandidat tersebut. Bagian dari klientelisme adalah *buying and selling votes*,

patronase, *constituency service*. Kemudian politik distribusi bias partisan terdiri dari dua macam yakni *electoral diversion of public programs* dan politik *pork barrel*. Bias kepentingan pemilu merupakan hal yang berkaitan dengan pengetahuan bahwa memberikan sumber daya kepada masyarakat dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap partai politik atau kandidat yang menerima sumber daya. Jika seseorang menerima alokasi sumber daya ini dan memilih untuk memilih partai atau kandidat lain, tidak ada dampaknya (Palenewen, J D O, 2014).

Sementara itu, *pork barrel politics* merupakan upaya atau strategi politik distributif yang diimplementasikan di daerah yang bersangkutan dengan politisi seperti daerah pemilihan (dapil) atau daerah geografis tertentu. Pengaplikasian strategi *pork barrel* ini didukung oleh program-program pemerintah yang bertujuan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan program tersebut dijadikan alat untuk kampanye (Walker, 2010). Adapun tiga alasan mengapa petahana atau *incumbent* melakukan strategi *pork barrel*. Pertama adalah logika bahwa membawa proyek ke daerahnya akan memberikan tanda atau riwayat yang membingkai citranya terhadap konstituen atau masyarakat. Kedua adalah logika bahwa membantu masyarakat artinya memperhatikan *public interest* atau kepentingan publik sehingga mampu meninggalkan kesan baik. Ketiga adalah dapat membeli kebebasan untuk mengejar UU yang mempengaruhi bagi mereka (Wilk, Eric M, 2010). Berdasarkan alasan tersebut fenomena *pork barrel* menggambarkan adanya pengalokasian dana yang tidak etis dari pusat untuk proyek-proyek tertentu, di mana ini terdapat hak istimewa atau *privilege* mengenai pengalokasian dana pusat

kepada daerah tertentu melalui perwakilan-perwakilan daerahnya (Smith, 2011). Menurut Andrew J. Taylor strategi *pork barrel* tidak hanya dilakukan pada legislator saja melainkan dapat dilakukan pula oleh eksekutif (Saragintan & Syahrul, 2016). Ini juga berlaku pada lokal eksekutif seperti gubernur dan walikota dengan tujuan untuk *vote gathering*. Di mana strategi pengambilan suara tersebut dalam konteks *pork barrel politics* adalah dengan menggunakan anggaran negara yakni pengalokasian dana dari pusat ke daerah untuk menaikkan elektabilitas seorang calon.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1984) merupakan bentuk penelitian yang sifatnya investigatif yang peneliti memaknai suatu fenomena sosial dengan cara membandingkan, membedakan, menggandakan, serta mengklasifikasikan objek penelitian. Penelitian ini menggali kecenderungan modalitas yang dimiliki Gibran Rakabuming sebagai Walikota Surakarta dengan perkembangan Kota Surakarta pada masa kepemimpinannya yang dikomparasikan dengan perkembangan Kota Surakarta pada kepemimpinan Walikota Surakarta sebelumnya.

Pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian untuk menjabarkan dan memahami objek yang diteliti terhadap suatu kasus yang dilakukan secara khusus. Pendekatan studi kasus juga menjawab masalah dari suatu fenomena sosial secara komprehensif atau menyeluruh. Pada penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa modalitas yang dimiliki Gibran yang akhirnya dapat membawa dirinya menjadi Walikota Surakarta. Modalitas tersebut yang kemudian diteliti lebih lanjut untuk ditinjau kapasitas kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik purposif dalam menentukan informan, yakni berdasar kriteria orang-orang yang punya pengetahuan, terlibat langsung maupun tidak langsung tentang fokus penelitian ini. Berdasar pada kriteria ini, informan penelitian adalah:

1. Mantan Walikota Surakarta, F.X Hadi Rudytamo
2. Wakil Walikota Surakarta, Teguh Prakosa
3. Direktur Utama LSM KOMPIP Solo, Eko Setyawan
4. Presiden BEM UNS, Hilmy A. Shidiqi

Semula peneliti merencanakan Gibran Rakabuming selaku subjek penelitian menjadi sebagai informan kunci. Namun peneliti tidak berhasil mewawancarainya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik purposive untuk menentukan informan lain yang memiliki pengetahuan tentang fokus penelitian ini.

1.7.4. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang didapatkan dari pengamatan peneliti dan informasi dari para informan yang diambil. Data sekunder merupakan data pendukung yakni diperoleh dari sumber data yang relevan dengan fenomena sosial yang diteliti untuk mendukung atau memperkuat data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi dan data publikasi.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan in-depth interview yakni proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara kepada informan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses wawancara dan dokumentasi terus berlanjut hingga pengumpulan data telah mencakup berbagai perspektif yang memperkuat hipotesis penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data pada penelitian kualitatif ada tiga langkah analisis data menurut (Miles, M B; Huberman, A M; Jhonny, S, 2014) yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan tahap mengolah data yang menajamkan, melakukan spesialisasi, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, melakukan pengorganisasian data supaya dapat dilakukan penarikan kesimpulan di akhir.

Kemudian penyajian data adalah bentuk analisis data yang menjabarkan informasi yang telah disusun dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penarikan kesimpulan adalah analisis data yang dilakukan peneliti selama di lapangan. Analisis data menggunakan tiga langkah tersebut setelahnya dalam proses penyajian data dilakukan validitas data dari berbagai sumber yang telah didapatkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu triangulasi sumber data adalah pendekatan yang digunakan untuk mengecek validitas data dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi hingga data yang berasal dari

dokumen dan arsip dan *member checking* adalah strategi untuk melakukan validitas data yang bersumber dari informan.